

BAB II LANDASAN TEORI

2.1. Teori *Agency*

Hubungan keagenan sebagai sebuah kontrak yang menyatakan bahwa salah satu pihak (prinsipal) meminta kepada pihak lain (agen) untuk melakukan jasa tertentu demi kepentingan prinsipal, dengan mendelegasikan otoritas kepadanya (Jansen dan Meckling), 1976 dalam Ratnasari, 2011). Teori keagenan mengasumsikan bahwa semua individu yang bertindak atas kepentingan mereka sendiri. Manajer ingin menyingkirkan dan segera kembali modal yang diinvestasikan. Sementara manajer sebagai agen ingin bunga dapat dipenuhi dengan memberikan kompensasi, bonus, insentif dan kompensasi deras pada kinerja. Jadi datang konflik kepentingan antara principal dan agen (Azis, 2014).

Pendelegasian otoritas telah menjadi kebutuhan dalam hal ini memungkinkan agen terutama bertanggung jawab atas kinerja mereka. Dalam hubungan keagenan timbul *agency cost* yang ditanggung oleh kedua belah pihak, baik prinsipal maupun agen. Oleh karena itu setiap perusahaan perlu menerapkan konsep *corporate governance* agar diharapkan dapat memberikan kepercayaan terhadap agen (manajemen) dalam mengelola kekayaan pemilik (pemegang saham), dan pemilik menjadi lebih yakin bahwa agen tidak akan melakukan suatu kecurangan untuk kesejahteraan agen sehingga dapat meminilasi biaya keagenan serta mencegah adanya konflik kepentingan (Chariri et al, 2009).

Pengungkapan *sustainability report* adalah beberapa bentuk tanggung jawab principal kepada agen, dengan pengecualian dari pelaksanaan laporan tahunan. Keberlanjutan hanya laporan sukarela sementara penyajian laporan tahunan wajib. Arah perusahaan saat ini tidak hanya mencoba untuk mencari *profit* (keuntungan) tetapi telah beralih ke tripple-p bottom line yaitu keuntungan (*profit*), bumi (*planet*) dan komunitas (*people*) (GRI, 2013).

Corporate governance yang merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima return atas dana yang telah mereka investikan. *Corporate governance* sangat berkaitan dengan bagaimana membuat para investor yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi mereka, yakin bahwa manajer tidak akan mencuri/menggelapkan atau menginvestasikan ke dalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan berkaitan dengan dana /kapital yang telah ditanamkan oleh investor. Selain itu *corporate governance* juga berkaitan dengan bagaimana para investor mengontrol para manajer. Dengan kata lain yakni *Corporate Governance* diharapkan akan dapat berfungsi untuk menekan atau menurunkan biaya keagenan (*agency cost*) (Lukviarman, 2016).

2.2 Sustainability Report

Sustainability report adalah laporan yang dibuat oleh perusahaan untuk mengukur, mengungkapkan (*disclosure*) dan upaya perusahaan bertanggung jawab untuk perusahaan untuk semua pemangku kepentingan (*Stakeholders*) untuk kinerja perusahaan terhadap pengembangan berkelanjutan. pelaporan keberlanjutan juga dapat digunakan sebagai referensi oleh perusahaan untuk mempertimbangkan laporan dari dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan (Effendi, 2016).

Informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan dapat dikelompokkan menjadi dua jenis yakni sukarela (*voluntary*) dan wajib (*mandatory*). Pengungkapan wajib adalah informasi yang diharuskan oleh peraturan yang berlaku, dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang (BAPEPAM, IAI, Menteri Keuangan, Pajak dll), peraturan otoritas jasa keuangan nomor 51/pojk.03/2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik.

Pelaporan keberlanjutan di indonesia telah didorong oleh beberapa undang-undang salah satunya seperti Pasal 66 ayat 2, Undang-undang No. 40 tahun 2007

tentang Perseroan Terbatas yang didalamnya menjelaskan bahwa perusahaan yang telah *go public* memiliki kewajiban membuat laporan berkelanjutan dan pasal 74 Undang-undang No. 40 tahun 2007 menjelaskan bahwa kegiatan bisnis perusahaan di lapangan dan / atau berkaitan dengan sumber daya alam yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Dengan adanya peraturan ini menurut *National Center For Sustainability Reporting* (NCSR), *sustainability* di Indonesia terus tumbuh, tapi jumlah perusahaan di Indonesia yang melaporkan *sustainability report* masih jauh tertinggal dibandingkan dengan negara maju. (Tarigan, 2014) mengatakan bahwa Lembaga ini, memandang kesadaran perusahaan untuk melaporkan *sustainability*. Padahal pelaporan kegiatan berkelanjutan dalam *sustainability report* terbukti berkorelasi positif terhadap kinerja keuangan perusahaan Weber *et.al* Pengungkapan *sustainability report* juga dapat meningkatkan kinerja keuangan dalam sisi profitabilitas dan likuiditas.

Sustainability report merupakan praktik pengukuran, pengungkapan, dan upaya akuntabilitas dari aktivitas keberlanjutan yang bertujuan untuk tercapainya *sustainability development* (pembangunan berkelanjutan). Pembangunan berkelanjutan (*sustainability development*) ini mencakup tiga aspek yaitu aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. *Sustainability development* adalah konsep pembangunan di mana memenuhi kebutuhan hidup manusia tidak boleh mengganggu kemampuan untuk memenuhi kebutuhan masa depan. Untuk mendukung pembangunan berkelanjutan mereka, laporan keberlanjutan digunakan sebagai salah satu informasi perusahaan media untuk para *stakeholder* (Sari, 2013).

(Brown *et al.* 2011) menyatakan bahwa ada satu panduan yang terbaik dalam membuat *sustainability report*. Hal yang dimaksud adalah *Global Reporting Initiative* (GRI). GRI terbentuk pada tahun 1999 di Boston, Amerika Serikat. Pada perusahaan di Indonesia, panduan untuk membuat *sustainability report* menggunakan pedoman GRI ini. Dalam pedoman pembuatan *sustainability report*

terdapat dua jenis pengungkapan yang harus dipenuhi yaitu pengungkapan standar umum dan pengungkapan standar khusus (*Global Reporting Initiative, 2013*).

Manfaat *sustainability report* berdasarkan pada kerangka GRI yaitu:

- a. Sebagai patokan atau ukuran bagi kinerja organisasional dengan melihat hukum, norma, undang-undang, standar kinerja, dan prakarsa sukarela.
- b. Menganalisis komitmen organisasional untuk selalu menjadi organisasi yang mementingkan pembangunan keberlanjutan.
- c. Membandingkan kinerja organisasi setiap kali.

Dalam *sustainability report* terdapat beberapa dimensi yang harus diungkapkan yaitu standar umum yang terdiri dari dimensi Ekonomi (EC), Lingkungan (EN), dan Sosial (SO) dan standar khusus. (*Global Reporting Initiative, 2013*) menjelaskan bahwa dimensi ekonomi dari *sustainability report* memiliki implikasi terhadap kondisi ekonomi para *stakeholder* dan memiliki implikasi terhadap sistem ekonomi di tingkat lokal, nasional, dan global. Lebih lanjut *Global Reporting Initiative* menjelaskan bahwa dimensi ekonomi dari *sustainability report* dapat memberi gambaran tentang arus modal diantara *stakeholder* yang berbeda, dan dapat memberi gambaran tentang dampak ekonomi dari organisasi di dalam masyarakat.

Dimensi lingkungan dari *sustainability report* memiliki implikasi langsung terhadap ekosistem baik yang hidup maupun yang tidak hidup. Dengan menerapkan pengungkapan dimensi lingkungan ini akan membantu perusahaan dalam menerapkan prinsip *Global Compact* (*Global Reporting Initiative, 2013*). Prinsip *Global Compact* merupakan prinsip yang berkaitan dengan lingkungan, yang mana perusahaan harus mendukung pendekatan yang preventif terhadap masalah lingkungan, tanggung jawab kepada lingkungan, dan mendorong pengembangan teknologi yang ramah lingkungan.

(*Global Compact PBB, 2000*) *Global Reporting Initiative* menyatakan bahwa dimensi sosial dari *sustainability report* mencakup efek dari perusahaan sistem

sosial di mana perusahaan beroperasi. Dimensi sosial dibagi menjadi sub-dimensi, yaitu: Praktik kerja dan Kenyamanan Bekerja, Hak Asasi Manusia, Masyarakat, dan Tanggung Jawab atas Produk.

Global Reporting Initiative adalah salah satu organisasi internasional yang kegiatannya terutama difokuskan pada pencapaian transparansi dan pelaporan dari sebuah perusahaan melalui pengembangan standar dan pedoman untuk pengungkapan keberlanjutan. Keberlanjutan akan menjadi salah satu media untuk menggambarkan hubungan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan (seperti konsep *Triple Bottom Line* dan pelaporan sosial. Pengungkapan *sustainability report* aturan yang telah ditetapkan dalam bentuk laporan independen, meskipun masih banyak implementasi *sustainability report* diungkapkan bersama-sama dengan laporan tahunan perusahaan (Gunawan, 2010). Laporan keberlanjutan organisasi menyajikan informasi terkait aspek material, yaitu aspek yang mencerminkan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial organisasi atau yang secara nyata memengaruhi asesmen dan pengambilan keputusan para pemangku kepentingan.

Sustainability reporting menurut GRI G4 Guidelines terdiri dari 3 dimensi berikut:

1. Ekonomi Dimensi keberlanjutan ekonomi berkaitan dengan dampak organisasi terhadap keadaan ekonomi bagi pemangku kepentingannya, dan terhadap sistem ekonomi di tingkat lokal, nasional, dan global.
2. Lingkungan Dimensi keberlanjutan lingkungan berkaitan dengan dampak organisasi pada sistem alam yang hidup dan tidak hidup, termasuk tanah, udara, air, dan ekosistem. Kategori lingkungan meliputi dampak yang terkait dengan input (seperti energi dan air) dan output (seperti emisi, efluen, dan limbah), termasuk juga keanekaragaman hayati, transportasi, dan dampak yang berkaitan dengan produk dan jasa, serta kepatuhan dan biaya lingkungan.

3. Sosial Dimensi keberlanjutan sosial membahas dampak yang dimiliki organisasi terhadap sistem sosial di mana organisasi beroperasi. Adapun beberapa kategori-kategori bidang sosial di antaranya yaitu meliputi:
 - a. Praktik ketenagakerjaan dan kenyamanan bekerja Indikator praktik ketenagakerjaan dan kenyamanan kerja meliputi lapangan pekerjaan, kondisi pekerja (jumlah, komposisi gender, pekerja penuh waktu dan paruh waktu), relasi buruh dengan manajemen, keselamatan dan kesehatan kerja, pelatihan, pendidikan, pengembangan karyawan, serta keberagaman dan peluang.
 - b. Hak asasi manusia Indikator kinerja hak asasi manusia menentukan bahwa setiap organisasi harus selalu memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya salah satunya yaitu dengan memperhatikan asas kesetaraan yang meliputi praktik investasi dan pengadaan, praktik manajemen, penerapan prinsip nondiskriminasi, kebebasan mengikuti perkumpulan, tenaga kerja anak, pemaksaan untuk bekerja, praktik pendisiplinan, praktik pengamanan, dan hak-hak masyarakat adat.
 - c. Masyarakat Indikator kinerja masyarakat memperhatikan dampak organisasi terhadap masyarakat dimana mereka beroperasi, dan reaksi dari institusi sosial kaitannya dengan kepedulian dan pengelolaan isu-isu seperti komunitas, korupsi, kebijakan publik, serta perilaku anti kompetitif seperti anti-trust dan monopoli.
 - d. Tanggung jawab atas produk Indikator kinerja tanggung jawab atas produk mencakup aspek seperti kesehatan keselamatan dari pengguna produk dan pelanggan pada umumnya, produk dan jasa, komunikasi untuk pemasaran, serta *Customer Privacy*.

Sementara tingkat pelaporan *sustainability report* dapat dipengaruhi oleh kinerja keuangan. Kinerja keuangan perusahaan diduga memiliki pengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report* mengingat adanya biaya untuk mengungkapkan tanggung jawab social dan lingkungan (Aniktia dan Khafid,

2015). Perusahaan yang memiliki kinerja keuangan yang baik akan berusaha untuk mengungkapkan informasi yang lebih (Indah, 2013).

World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) menjelaskan manfaat yang didapat dari pengungkapan *sustainability report* antara lain:

1. *Sustainability report* memberikan informasi kepada stakeholder (pemegang saham, anggota komunitas lokal, pemerintah) dan meningkatkan prospek perusahaan, serta membantu mewujudkan transparansi.
2. *Sustainability report* dapat membantu membangun reputasi sebagai alat yang memberikan kontribusi untuk meningkatkan brand value, market share, dan loyalitas konsumen jangka panjang.
3. *Sustainability report* dapat menjadi cerminan bagaimana perusahaan mengelola risikonya.
4. *Sustainability report* dapat digunakan sebagai stimulasi leadership thinking dan performance yang didukung dengan semangat kompetisi.
5. *Sustainability Report* dapat mengembangkan dan memfasilitasi pengimplementasian dari sistem manajemen yang lebih baik dalam mengelola dampak lingkungan, ekonomi, dan sosial.
6. *Sustainability report* cenderung mencerminkan secara langsung kemampuan dan kesiapan perusahaan untuk memenuhi keinginan pemegang saham untuk jangka panjang.
7. *Sustainability report* membantu membangun ketertarikan para pemegang saham dengan visi jangka panjang dan membantu mendemonstrasikan bagaimana meningkatkan nilai perusahaan yang terkait dengan isu sosial dan lingkungan.

Pengungkapan *sustainability report* merupakan suatu pengungkapan yang bersifat sukarela dari perusahaan yang berwujud laporan mengenai aspek ekonomi sosial dan lingkungan perusahaan. Pengungkapan *sustainability report* sebuah organisasi menyajikan informasi terkait aspek material, yaitu aspek yang mencerminkan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial organisasi atau yang secara nyata mempengaruhi asesmen dan pengambilan keputusan para pemangku kepentingan.

Sustainability report menurut GRI-G4 Guidelines terdiri dari beberapa dimensi seperti berikut ini :

1. Ekonomi

Dimensi keberlanjutan ekonomi berkaitan dengan dampak organisasi terhadap keadaan ekonomi bagi pemangku kepentingan dan terhadap sistem ekonomi di tingkat lokal, nasional, dan global. Total pengungkapan pada aspek ekonomi berjumlah 9 item pengungkapan yang terbagi dalam beberapa kategori sebagai berikut :

- a. Kinerja ekonomi : G4-EC1; G4-EC2; G4-EC3; G4-EC4
- b. Keberadaan pasar : G4-EC5; G4-EC6
- c. Dampak ekonomi tidak langsung : G4-EC7; G4-EC8
- d. Praktik pengadaan : G4-EC9

2. Lingkungan Dimensi keberlanjutan lingkungan berkaitan dengan dampak dari organisasi yang berhubungan dengan alam yang hidup dan tidak hidup, termasuk tanah, air, udara, dan ekosistem. Kategori lingkungan meliputi dampak yang terkait dengan input (seperti energi dan air) dan output (seperti emisi, efluen, dan limbah), termasuk juga keanekaragaman hayati, transportasi, dan dampak yang berkaitan dengan produk dan jasa, serta kepatuhan dan biaya lingkungan. Jumlah item pengungkapan sustainability report yang berhubungan dengan lingkungan berjumlah 34 item yang dibagi dalam beberapa aspek sebagai berikut :

- a. Bahan : G4-EN1; G4-EN2
- b. Energi : G4-EN3; G4-EN4; G4-EN5; G4-EN6; G4-EN7
- c. Air : G4-EN8; G4-EN9; G4-EN10
- d. Keanekaragaman Hayati : G4-EN11; G4-EN12; G4-EN13; G4- EN14
- e. Emisi : G4-EN15; G4-EN16; G4-EN17; G4-EN18; G4-EN19; G4- EN20; G4-EN21
- f. Efluen dan Limbah : G4-EN22; G4-EN23; G4-EN24; G4-EN25; G4-EN26
- g. Produk dan Jasa : G4-EN27; G4-EN28
- h. Kepatuhan : G4-EN29
- i. Transportasi : G4-EN30
- j. Lain-lain : G4-EN31

k. Asesmen Pemasok atas Lingkungan : G4-EN32; G4-EN33

l. Mekanisme Pengaduan Masalah Lingkungan : G4-EN34

3. Sosial

Dimensi keberlanjutan sosial membahas dampak yang dimiliki organisasi terhadap sistem sosial dimana organisasi beroperasi. Jumlah item pengungkapan sustainability report yang berhubungan dengan social berjumlah 48 item yang terdiri dari beberapa kategori :

a. Praktik Ketenagakerjaan Dan Kenyamanan Bekerja

- 1) Kepegawaian : G4-LA1; G4-LA2; G4-LA3
- 2) Hubungan Industrial : G4-LA4
- 3) Kesehatan dan Keselamatan Kerja : G4-LA5; G4-LA6; G4-LA7; G4-LA8
- 4) Pelatihan dan Pendidikan : G4-LA9; G4-LA10; G4-LA11;
- 5) Keberagaman dan Kesetaraan Peluang : G4-LA12
- 6) Kesetaraan Remunerasi Perempuan dan Laki-laki: G4-LA13
- 7) Asesmen Pemasok terkait Praktik Ketenagakerjaan : G4-LA14; G4-LA15
- 8) Mekanisme Pengaduan Masalah Ketenagakerjaan: G4-LA16

b. Hak Asasi Manusia

- 1) Investasi : G4-HR1; G4-HR2
- 2) Non-diskriminasi : G4-HR3
- 3) Kebebasan Berserikat dan Perjanjian Kerja Bersama : G4-HR4
- 4) Pekerja Anak : G4-HR5
- 5) Pekerja Paksa atau Wajib Kerja : G4-HR6
- 6) Praktik Pengamanan : G4-HR7
- 7) Hak Adat : G4-HR8
- 8) Asesmen : G4-HR9
- 9) Asesmen Pemasok atas Hak Asasi Manusia : G4-HR10; G4-HR11
- 10) Mekanisme Pengaduan Masalah Hak Asasi Manusia : G4-HR12

c. Masyarakat

- 1) Masyarakat Lokal : G4-SO1; G4-SO2
- 2) Anti-korupsi : G4-SO3; G4-SO4; G4-SO5
- 3) Kebijakan Publik : G4-SO6
- 4) Anti Persaingan : G4-SO7

5) Kepatuhan : G4-SO8

6) Asesmen Pemasok atas Dampak terhadap Masyarakat : G4- SO9; G4-SO10

7) Mekanisme Pengaduan Dampak terhadap Masyarakat : G4- SO11

d. Tanggung Jawab Atas Produk

1) Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan : G4-PR1; G4-PR2

2) Pelabelan Produk dan Jasa : G4-PR3; G4-PR4; G4-PR5

3) Komunikasi Pemasaran: G4-PR6; G4-PR7

4) Privasi Pelanggan : G4-PR8

5) Kepatuhan : G4-PR9

2.3 Corporate Governance

Menurut *Forum Corporate Governance on Indonesia (FCGI)*, *good corporate governance* adalah seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, manajemen (manajer) perusahaan, kreditur, pemerintah, karyawan serta pemangku kepentingan internal dan eksternal yang lebih berkaitan dengan hak dan kewajiban atau dengan kata lain sistem yang mengontrol perusahaan. Istilah *corporate governance* ini muncul karena adanya *agency theory*, di mana kepengurusan suatu perusahaan terpisah dari kepemilikan (Effendi, 2016:3).

Menurut Kementerian BUMN, sesuai pasal 1 ayat 1, Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governanve*) pada BUMN, disebutkan bahwa tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), yang selanjutnya disebut GCG adalah prinsip- prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha. Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, secara singkat tata kelola perusahaan atau *corporate governance* adalah sistem yang dirancang untuk mendorong manajemen profesional perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, kewajaran, dan kesetaraan. *Corporate governance* dapat mendorong terbentuknya

pola kerja manajemen yang bersih, transparan, dan profesional (BTP) (Effendi, 2016:3).

Tujuan *Corporate Governance* menurut Kementerian BUMN, sesuai pasal 4 Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN, penerapan prinsip-prinsip GCG pada BUMN, bertujuan untuk (Effendi, 2016:7-8) :

1. Mengoptimalkan nilai-nilai BUMN agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan BUMN;
2. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ Persero/ Organ Perum;
3. Mendorong agar Organ Persero/ Organ Perum dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN;
4. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional; serta
5. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

Berikut ini adalah manfaat yang bisa dipetik dengan diterapkannya prinsip-prinsip GCG di BUMN (Effendi, 2016:8).

1. Dapat meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengembalian keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada pemangku kepentingan.
2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak rigid (karena faktor kepercayaan) yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan (*corporate value*).

3. Khusus untuk BUMN yang telah *go public*, dengan diterapkannya prinsip-prinsip GCG dapat meningkatkan minat investor untuk membeli saham BUMN tersebut.

Prinsip-prinsip GCG sesuai pasal 3 Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN, prinsip-prinsip GCG menurut BUMN sebagai berikut (Effendi, 2016:17-18).

1. Transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan pengungkapan informasi materiil yang relevan mengenai perusahaan;
2. Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban manajemen perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif dan ekonomis;
3. Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
4. Kemandirian (*independence*), yaitu suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa konflik kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
5. Kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul sebagai akibat dari perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Empat komponen utama yang diperlukan dalam konsep GCG ini, yaitu *fairness*, *transparency*, *accountability*, dan *responsibility*. Keempat komponen tersebut penting karena penerapan prinsip GCG secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan (Wibowo, 2010). Keempat komponen tersebut menjadi acuan dalam menentukan setiap langkah yang akan diambil oleh segenap jajaran manajemen dan karyawan Perseroan, yaitu:

- a) Keadilan, yang menjamin bahwa setiap keputusan dan kebijakan yang diambil adalah demi kepentingan seluruh pihak yang berkepentingan, termasuk para pelanggan, pemasok, pemegang saham, investor serta masyarakat luas.
- b) Transparansi, berupa komitmen untuk memastikan ketersediaan dan keterbukaan informasi penting bagi pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) mengenai keadaan keuangan, pengelolaan dan kepemilikan Perseroan secara akurat, jelas dan tepat waktu.
- c) Akuntabilitas, yang menjamin tersedianya mekanisme, peran tanggung jawab jajaran manajemen yang profesional atas semua keputusan dan kebijakan yang diambil sehubungan dengan aktivitas operasional Perseroan.
- d) Tanggung Jawab, yang mencakup adanya deskripsi yang jelas tentang peranan dari semua pihak dalam mencapai tujuan bersama, termasuk memastikan dipatuhinya peraturan serta nilai-nilai sosial.

Di Indonesia, kebijakan mengenai pengungkapan *corporate governance* diatur oleh BAPEPAM. BAPEPAM melalui keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan nomor: KEP-134/BL/2006 tentang kewajiban penyampaian laporan tahunan yang memuat uraian singkat mengenai penerapan *corporate governance* perusahaan yang telah dan akan dilaksanakan oleh perusahaan dalam periode laporan tahunan terakhir. Peraturan tersebut memuat 16 point item yang terdiri dari pemegang saham, dewan komisaris, dewan direksi, komite audit, komite nominasi dan remunerasi, komite manajemen resiko, komite tata kelola perusahaan (GCG), komite-komite lain yang dimiliki perusahaan, sekretaris perusahaan, pelaksanaan pengawasan dan pengendalian internal, manajemen resiko, perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, anggota direksi dan anggota dewan komisaris, akses informasi dan data perusahaan, etika perusahaan, pernyataan penerapan good corporate governance, dan informasi penting lainnya yang berkaitan dengan penerapan good corporate governance. Enam belas point item tersebut memuat 93 item pengungkapan yang digunakan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah mengungkapkan informasi mengenai corporate governance.

2.3.1 Komite Audit

Komite audit adalah orang-orang independen dan tidak terlibat dalam tugas sehari-hari manajemen untuk mengelola bisnis dan mengalami untuk melakukan fungsi pengawasan secara efektif. Komite audit akan bertanggungjawab langsung kepada dewan komisaris. Dengan demikian apabila fungsi dan tanggung jawab komite audit dapat dilaksanakan dengan baik, maka hal ini akan mendorong perusahaan untuk selalu bertanggung jawab kepada kepentingan *stakeholders* (Waryanto, 2010).

Menurut (Arents, 2010) komite audit adalah umumnya komite audit terdiri dari tiga atau lima kadang tujuh orang yang bukan bagian dari manajemen perusahaan. Tujuan pembentukan komite audit yaitu untuk menengahi antara auditor dan manajemen perusahaan dalam kasus konflik. Sedangkan menurut Peraturan Nomor IX.1.5 dalam lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor : Kep-29/PM/2004 mengemukakan bahwa Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya.

Pada umumnya, komite audit mempunyai tanggung jawab pada tiga bidang, yaitu:

1. Laporan Keuangan

Komite audit keuangan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa laporan dibuat telah memberikan gambaran yang benar tentang kondisi keuangan, hasil usaha, rencana, dan komitmen perusahaan jangka panjang.

2. Tata Kelola Perusahaan

Komite audit perusahaan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan telah dilaksanakan sesuai dengan hukum dan peraturan dan etika, menerapkan pengawasan yang efektif dari konflik kepentingan dan penipuan oleh karyawan.

3. Pengawasan Perusahaan

Komite audit bertanggung jawab untuk memantau perusahaan seperti hal-hal yang berpotensi berbahaya dan sistem pengendalian internal dan pemantauan proses pemantauan yang dilakukan auditor internal.

Komite Audit beranggotakan satu atau lebih anggota Dewan Komisaris. Komite Audit harus diketuai oleh seorang Komisaris Independen (Surat Keputusan Ketua Bapepam Kep-29/PM/2004). Anggota Komite Audit diharuskan memiliki keahlian yang memadai. Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam Kep-29/PM/2004 menyatakan bahwa anggota komite audit harus:

1. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang sesuai dengan pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
2. Salah seorang dari anggota komite audit memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan;
3. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan;
4. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep- 41/PM/2003 yang menyatakan bahwa ukuran keanggotaan komite audit adalah ukuran keanggotaan komite audit sekurang-kurangnya terdiri dari tiga (3) anggota, termasuk perusahaan direktur independen yang juga menjabat sebagai ketua komite audit, sedangkan anggota lainnya merupakan pihak eksternal yang independen dimana setidaknya salah satu dari mereka memiliki kemampuan dalam bidang akuntansi dan atau keuangan. Pertimbangan anggota komite audit berjumlah lebih dari satu orang disebabkan agar antar anggota komite audit dapat saling bertukar pikiran dalam melaksanakan tanggung jawabnya dalam membantu dewan komisaris.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Komite Audit untuk menjelaskan ukuran komite audit yang terdiri dari setidaknya tiga (3) anggota dari komisaris independen dan pihak luar perusahaan umum.

2.3.2 Dewan Direksi

Dewan direksi atau dewan direktur merupakan seseorang yang ditunjuk memimpin Perseroan Terbatas (PT), dapat berasal dari seseorang yang memiliki perusahaan atau orang profesional yang ditunjuk oleh pemilik bisnis. Dewan

direksi bertindak sebagai aspek sistem pengendalian dalam suatu perusahaan, memiliki peran ganda yaitu monitoring dan pengambil keputusan (Diling, 2010).

Pengertian direksi menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 (UUPT) pasal 1 ayat 4 Ini adalah bagian dari perusahaan bertanggung jawab penuh atas manajemen kepentingan dan tujuan bisnis perusahaan dan mewakili perusahaan baik di dalam dan di luar pengadilan, sesuai dengan hukum.

Direksi wajib melakukan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan UU PT dengan memperhatikan kepentingan perusahaan dan pihak yang bersangkutan dan harus bertanggung jawab untuk pelaksanaan tugas Ini disebut pemegang saham melalui RUPS. Keefektifan memantau kegiatan perusahaan dapat dipengaruhi oleh bagaimana dewan direksi dibentuk dan diselenggarakan. Dalam penerapannya, GCG sangat tergantung pada fungsi dari dewan direksi diyakini telah mengurus perusahaan. Direksi sebagai fungsi organ perusahaan dan menjadi penuh tanggung jawab dalam mengelola perusahaan. Semakin tinggi frekuensi pertemuan antara anggota dewan direksi, menunjukkan lebih komunikasi yang sering dan koordinasi antara anggota sehingga lebih memudahkan untuk mencapai tata kelola perusahaan yang baik (Suryono dan Prastiwi, 2011).

2.3.3 Governance Committee

Governance committee adalah komite yang terdiri dari beberapa anggota dewan direksi (Willey, 2009). Komite ini bertugas untuk mengembangkan dan merekomendasikan kepada dewan, pedoman dalam pelaksanaan dan etika *corporate governance*. Pembentukan *good corporate governance* yang berkesinambungan tidak hanya menjalankan praktik biasa dalam hal pelaksanaan RUPS, penunjukkan dewan komisaris, penunjukkan dewan direksi, dan penunjukkan anggota komite audit, melainkan memerlukan pembentukan komite-komite tambahan dari perusahaan. Salah satu komite yang dibentuk untuk menunjang *good corporate governance* adalah *governance committee*.

Menurut (Suryono dan Prastiwi, 2011) penciptaan *good corporate governance* suatu perusahaan dapat dilakukan oleh pembentukan dan pengangkatan anggota *governance committee* yang berkompeten dan berkualitas. *Governance committee* adalah komite yang terdiri dari beberapa anggota dewan direksi.

Corporate Governance Committee ini menganut pandangan bahwa dewan harus memiliki beberapa tingkat kemandirian dari manajemen agar dapat secara efektif memenuhi tanggung jawab mereka. Komite merekomendasikan bahwa direktur independen membuat setidaknya sepertiga dari dewan. Anggota direksi yang independen memainkan peran penting di mana kepentingan manajemen, perusahaan, dan pemegang saham dapat berbeda, seperti remunerasi eksekutif, perencanaan suksesi, perubahan perusahaan kontrol dan fungsi audit. Selain itu, mereka mampu mengarah pandangan obyektif untuk evaluasi kinerja dewan dan manajemen.

Gagasan pembentukan komite ini pada awalnya, merupakan keharusan bagi perusahaan berdasarkan Undang- Undang Sarbanes- Oxley 2002 di Amerika Serikat. Tujuan dari *governance committee* adalah melakukan pengawasan keefektifan pengendalian internal perusahaan atas laporan keuangan. (Suryono dan Prastiwi, 2011) menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa upaya untuk mendorong penerapan GCG, antara lain membentuk Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG) yang telah mengeluarkan pedoman GCG dan pada tahun 2004, KNKCG diubah menjadi Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG).

2.4 Karakteristik Perusahaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakteristik dapat diartikan sebagai ciri-ciri khusus atau sifat khas yang mengikut sifat tertentu. Karakteristik Perusahaan itu sendiri adalah karakteristik khusus yang melekat pada masyarakat, menandai sebuah perusahaan dan yang membedakan perusahaan lain.

Menurut Mirfazil dan Nurdiono (2007) dampak lingkungan perusahaan tergantung pada jenis atau karakteristik perusahaan. Karakteristik perusahaan yang menghasilkan dampak lingkungan hidup yang tinggi akan menuntut pemenuhan tanggung jawab lingkungan yang tinggi pula.

Karakteristik perusahaan dapat menjelaskan variasi luas pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan, karakteristik perusahaan merupakan prediktor kualitas pengungkapan (Lang and Lundholm, 1993 dalam Rosmasita, 2007). Setiap perusahaan memiliki karakteristik yang berbeda antara entitas yang satu dengan yang lain. Karakteristik perusahaan dapat berupa ukuran perusahaan (*size*), leverage, basis perusahaan, jenis industri, serta profil dan karakteristik lainnya.

Karakteristik perusahaan adalah hal-hal yang melekat pada perusahaan. Karakteristik perusahaan menurut Subiyantoro (1997, dalam Ariyani, 2019) ada 3 yaitu:

1. Struktur (*structure*), variabel yang termasuk dalam karakteristik berdasarkan struktur adalah ukuran perusahaan dan leverage.
2. Kinerja (*performance*), variabel yang termasuk dalam karakteristik berdasarkan kinerja adalah likuiditas dan profitabilitas.
3. Pasar (*market*), variabel yang termasuk dalam karakteristik berdasarkan pasar adalah jenis industri dan ukuran perusahaan audit.

Pada penelitian kali ini atribut karakteristik perusahaan yang digunakan adalah ukuran perusahaan, leverage, likuiditas dan profitabilitas.

2.4.1 Ukuran Perusahaan

Ukuran suatu perusahaan dapat mempengaruhi pengungkapan penuh informasi perusahaan. Secara umum perusahaan besar akan mengungkapkan informasi lebih dari usaha kecil. Perusahaan-perusahaan besar umumnya memiliki sejumlah besar aset, penjualan besar, keterampilan karyawan yang baik, jenis produk dari sistem informasi yang canggih banyak, struktur kepemilikan lengkap, sehingga memungkinkan dan membutuhkan tingkat informasi umum (Luthfia, 2012).

Perusahaan besar yang memiliki informasi biaya rendah, kompleksitas dan dasar kepemilikan yang lebih besar atas perusahaan kecil sehingga perusahaan besar cenderung mengungkapkan informasi lebih banyak (Suryono dan Prastiwi, 2011).

Khafid dan Mulyaningsih (2012), menyebutkan bahwa lebih besar perusahaan, memiliki kecenderungan untuk mengungkapkan informasi lebih banyak. Perusahaan dengan aset yang besar banyak mendapat sorotan publik. Karena itu, perusahaan besar cenderung lebih biaya mengungkapkan informasi yang lebih luas sebagai upaya untuk mempertahankan legitimasi perusahaan (Natalia dan Wahidahwati, 2016).

Ukuran perusahaan merupakan bagian dari karakteristik perusahaan dalam hubungannya dengan struktur suatu perusahaan. Ukuran perusahaan adalah sebagai rata-rata jumlah pendapatan bersih untuk tahun ini bersangkutan sampai beberapa tahun (Bringham dan Houston, 2010).

Perusahaan yang telah dikategorikan sebagai perusahaan yang besar maka telah dianggap kinerja perusahaan sudah sangat bagus sehingga dapat menarik para stakeholders untuk memiliki kepentingan di dalam perusahaan. Dengan adanya anggapan yang demikian maka perusahaan harus menerapkan *Good Corporate Governance* agar perusahaan tetap eksis di mata stakeholders dan manajemen di dalam perusahaan. Besar kecilnya sebuah perusahaan akhirnya berdampak pada struktur modal perusahaan tersebut, sehingga perusahaan membutuhkan dana yang besar untuk berinvestasi ke dalam perusahaan (Utari, 2014).

Ukuran perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan nilai total aset perusahaan. Total aset merupakan jumlah keseluruhan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan yang besar cenderung menggunakan sumber daya yang besar untuk membiayai aktivitas perusahaannya. Total aset dapat dilihat dalam laporan keuangan pada masing-masing sampel dalam penelitian ini.

2.4.2 Leverage

Rasio *leverage* pada penelitian ini rasio *leverage* yang akan digunakan adalah *debt to equity ratio* (DER). Rasio ini menggambarkan sejauh mana pemilik modal dapat menutupi utang kepada pihak luar, yang lebih kecil rasio ini, semakin baik (Harahap, 2016). Semakin besar nilai DER maka semakin besar risiko operasional perusahaan dan begitu pula sebaliknya. *Debt To Equity Ratio* mencerminkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajiban, yang ditandai dengan seberapa banyak bagian dari modal sendiri yang digunakan untuk untuk membayar utang. Oleh karena itu, semakin rendah DER akan menjadi lebih tinggi perusahaan untuk membayar semua kewajibannya. DER merupakan kelompok rasio yang menjadi salah satu variabel dependen dalam penelitian ini. DER ditunjukkan dengan total kewajiban dibagi dengan total ekuitas. DER lebih tinggi menunjukkan lebih besar dari total utang terhadap total ekuitas (Harahap, 2016). Hal ini juga akan menunjukkan semakin besar ketergantungan perusahaan terhadap pihak luar (kreditur) sehingga tingkat resiko perusahaan semakin besar. Menurut (Brigham dan Houston, 2006), semakin tinggi risiko dari penggunaan lebih banyak utang akan cenderung menurunkan harga saham. Investor harus memperhatikan perusahaan kesehatan melalui perbandingan antara ekuitas dan pinjaman. Jika ekuitas lebih dari modal pinjaman, perusahaan tidak akan mudah bangkrut.

Debt to Equity Ratio (DER) merupakan rasio hutang terhadap modal. Rasio Ini mengukur seberapa banyak perusahaan dibiayai oleh utang, di mana hal ini menggambarkan nilai rasio gejala tinggi yang kurang baik bagi perusahaan. Peningkatan utang pada gilirannya akan mempengaruhi ukuran laba bersih tersedia untuk pemegang saham termasuk dividen yang diterima pada kewajiban untuk utang gaji lebih diutamakan daripada pembagian dividen (Sartono, 2010). Sedangkan menurut Harahap (2016), pengertian *Debt to Equity Ratio* adalah: “*Debt to Equity Ratio* merupakan rasio yang menggambarkan sampai sejauh mana modal pemilik dapat menutupi utang-utang kepada pihak luar. Semakin kecil rasio ini semakin baik” Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa *Debt to Equity Ratio* adalah rasio yang digunakan untuk

menilai liabilitas dan ekuitas dan dipakai untuk memperlihatkan jaminan yang tersedia bagi kreditor. Untuk bank (kreditor), semakin besar rasio ini, karena lebih menguntungkan besar ditanggung pada kegagalan yang mungkin di perusahaan seperti ketidakmampuan untuk melunasi biaya utang dan bunga. Tapi untuk perusahaan itu semakin besar batas keamanan untuk peminjam dalam kasus kehilangan atau susut aktiva. Rasio ini memberikan indikasi umum kelayakan dan risiko keuangan perusahaan. Semakin tinggi *Debt to Equity Ratio* menunjukan semakin tinggi penggunaan utang sebagai sumber pendanaan perusahaan. Hal ini dapat menimbulkan resiko yang cukup besar bagi perusahaan ketika perusahaan tidak mampu membayar kewajiban tersebut pada saat jatuh tempo, sehingga akan mengganggu kontinuitas operasi perusahaan. Selain itu, perusahaan akan dihadapkan pada biaya bunga yang tinggi sehingga dapat menurunkan laba perusahaan. Kewajiban atau utang bukan suatu yang buruk jika dapat memberikan keuntungan kepada pemiliknya, jika kewajiban atau utang ini dapat dimanfaatkan dengan efektif, maka hasil yang diperoleh berupa laba dapat cukup untuk membayar biaya bunga secara periodik ditambah kewajiban pokok. Hubungan *Debt to Equity Ratio* (DER) dengan *sustainability report* yaitu jika perusahaan memiliki nilai DER yang kecil diharapkan perusahaan akan mampu *sustainability report* dan *debt to equity ratio* (DER) juga berhubungan dengan keberlangsungan perusahaan dimasa yang akan datang.

2.4.3 Likuiditas

Rasio likuiditas pada penelitian ini yang akan digunakan adalah *current ratio* (CR). Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk kewajiban memenuhi menggunakan aktiva lancar jangka pendek yang dimiliki. Selanjutnya untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk jangka pendek yaitu dengan menggunakan rasio likuiditas. Perusahaan yang mendapatkan tingkat likuiditas tinggi dianggap mampu mengelola bisnisnya, sehingga tingkat risiko yang rendah. Perusahaan yang memiliki tingkat likuiditas yang tinggi merupakan gambaran keberhasilan dari perusahaan membayar kewajiban jangka pendeknya dengan tepat waktu. Ini tentu menunjukkan kemampuan perusahaan kredibel yang menciptakan citra positif dan kuat melekat pada perusahaan. Image positif

semakin memungkinkan para pemangku kepentingan untuk selalu eksis pada perusahaan atau dukungan perusahaan (Suryono, 2011).

Apabila rasio lancar rendah, dapat dikatakan bahwa perusahaan modal kurang untuk membayar hutang (Kasmir, 2015). Salah satu cara adalah untuk meningkatkan kepercayaan diri dan ada citra positif yaitu dengan mengungkapkan informasi tambahan yang menggambarkan kegiatan perusahaan yang peduli tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pengungkapan laporan keberlanjutan telah menjadi salah satu strategi perusahaan untuk terus menunjukkan kegiatan perusahaan dalam melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Hubungan *current ratio* dengan *sustainability report* adalah jika perusahaan memiliki *current ratio* yang tinggi, maka bisa dikatakan perusahaan tersebut juga mampu untuk memenuhi hutang jangka pendek yang secara tidak langsung menandakan bahwa perusahaan tersebut juga mempunyai kinerja keuangan yang bagus dan diharapkan perusahaan tersebut melakukan pengungkapan *sustainability report*.

2.4.4 Profitabilitas

Rasio profitabilitas, pada penelitian ini rasio profitabilitas yang akan digunakan adalah *Return On Asset* (ROA), rasio profitabilitas bertujuan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba, baik dalam hubungannya dengan penjualan aset, maupun terhadap modal sendiri. Salah satu rasio yang dapat digunakan adalah *return on aset* (ROA). Analisis ROA adalah rasio antara yang paling rasio profitabilitas penting dan teknik analisis yang umum digunakan untuk mengukur efektivitas keseluruhan operasi perusahaan. Rasio ini, sering digunakan oleh investor dalam menilai suatu saham. ROA digunakan karena mampu mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan di masa lalu dan kemudian diproyeksikan di masa depan. *Return On Asset* (ROA) adalah rasio perputaran aset yang menjelaskan diukur dari volume penjualan. Semakin besar ROA nya maka semakin baik, ini berarti bahwa aset bisa lebih cepat berbalik dan membuat keuntungan (Harahap, 2016). Dengan meningkatnya profitabilitas perusahaan, perusahaan memiliki lebih

banyak uang untuk membuat kegiatan aktivitas-sosial. Hal dampak pada lebih banyak lagi informasi yang dapat diungkapkan dalam laporan keberlanjutan. Dengan demikian, semakin besar tingkat profitabilitas perusahaan maka akan semakin besar pula pengungkapan informasi sosial (Munif, 2010).

Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi cenderung mengungkapkan informasi lebih karena mereka ingin menunjukkan kepada publik atau pihak lain bahwa perusahaan memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi dibandingkan dengan perusahaan lain dengan industri yang sama. Selain itu, perusahaan juga ingin menunjukkan kepada investor bahwa operasi berjalan efisien. Melalui pengungkapan *sustainability report*, perusahaan dapat menyampaikan informasi mengenai aktivitas yang dilakukan perusahaan yang berpengaruh terhadap kondisi sosial, masyarakat dan lingkungan. Dengan *sustainability report* perusahaan dapat mengkomunikasikan kinerja manajemen dalam mencapai keuntugnan jangka panjang perusahaan kepada stakeholders, contohnya yaitu perbaikan kinerja keuangan, maksimalisasi profit dan kesuksesan perusahaan jangka panjang (Faradiza, 2014).

Penggunaan ROA pada penelitian ini dikarenakan ROA mampu mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada masa lampau untuk kemudian diproyeksikan di masa yang akan datang. Asset atau aktiva yang dimaksud adalah keseluruhan harta perusahaan, yang diperoleh modal sendiri atau modal asing yang telah diubah menjadi aset perusahaan yang digunakan untuk kelangsungan hidup perusahaan dan ROA juga memiliki sifat yang menyeluruh, jika perusahaan terlibat dalam praktek sebuah akuntansi yang baik dan manajemen dengan menggunakan teknik analisis kembali Asset (ROA) mengukur efisiensi penggunaan modal kerja, efisiensi produksi dan penjualan efektivitas (Munawir, 2014). Hubungan *Return On Asset* (ROA) dengan *sustainability report* yaitu jika perusahaan menghasilkan keuntungan yang tinggi maka diharapkan akan melakukan pengungkapan *sustainability report*.

2.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
2	Pujiastuti (2015)	Pengaruh Karakteristik Perusahaan Dan Good Corporate Governance Terhadap Luas Pengungkapan Sustainability Report	Variabel Independen : Ukuran perusahaan, profitabilitas, ukuran dewan komisaris, leverage Variabel Dependen : Laporan berkelanjutan	Ukuran perusahaan, profitabilitas, dan ukuran dewan komisaris adanya pengaruh yang signifikan positif terhadap pengungkapan laporan berkelanjutan perusahaan; leverage pengaruh signifikan negatif terhadap pengungkapan laporan berkelanjutan perusahaan.
3	Ria Aniktia dan Muhammad Khafid (2015)	Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Dan Kinerja Keuangan Terhadap	Variabel Independen : Komite audit, governance committee, dewan komisaris, kepemilikan manajerial,	komite audit, governance committee dan leverage berpengaruh positif terhadap pengungkapan sustainability report;

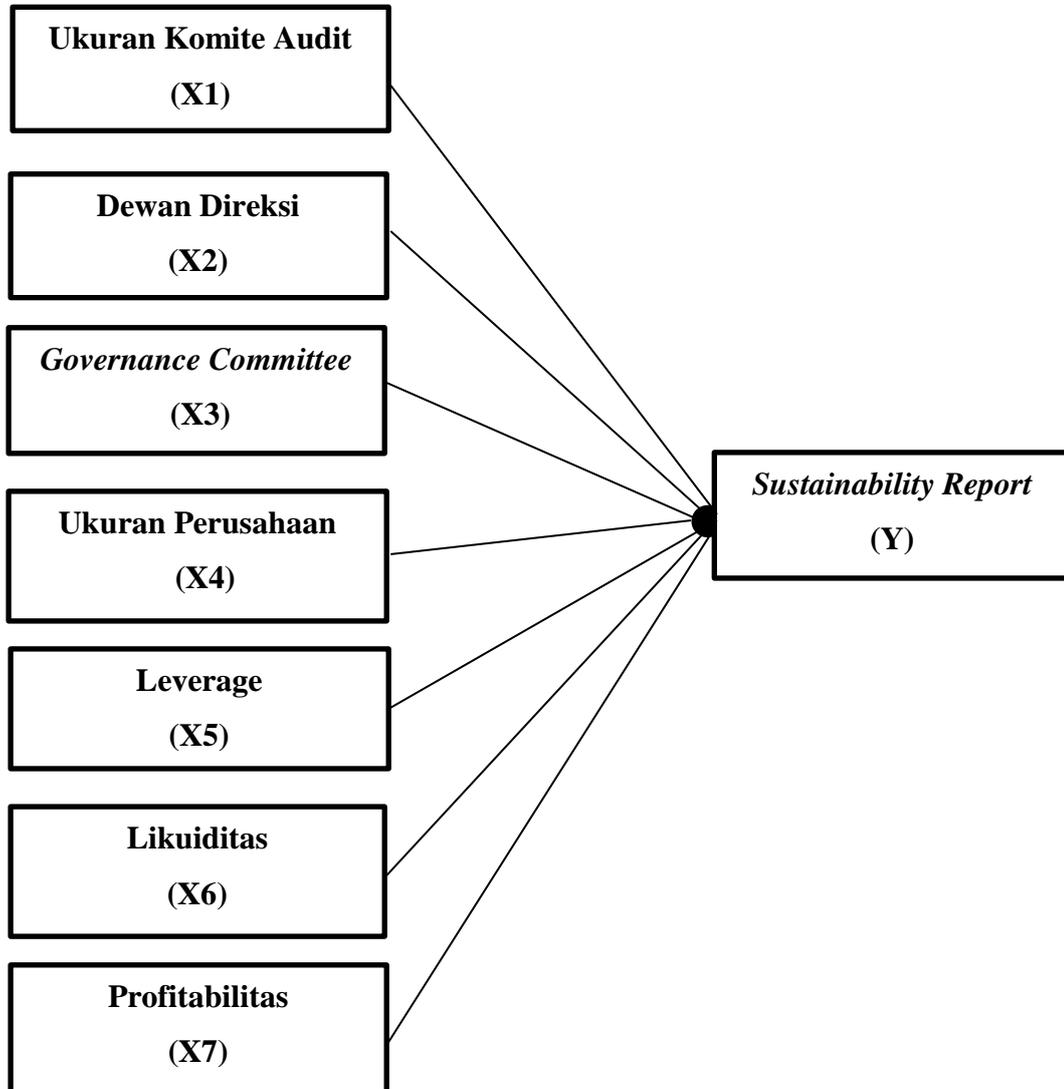
		Pengungkapan Sustainability Report	profitabilitas, leverage. Variabel Dependen : Sustainability Report	dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sustainability report.
4	Mulyaning sih (2015)	Pengaruh Karakteristik Perusahaan Dan Corporate Governance Terhadap Publikasi Sustainability Report	Variabel Independen : Profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, dewan direksi, komite audit, governance committee. Variabel Dependen : sustainability report.	Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan governance committee berpengaruh positif terhadap publikasi Sustainability Report; leverage tidak berpengaruh negative terhadap publikasi sustainability report; dewan direksi dan komite audit tidak berpengaruh positif terhadap publikasi sustainability report
5	Rizky Zakiyah (2016)	Pengaruh Good Corporate	Variabel Independen : Good Corporate	Ukuran Komite Audit, Frekuensi Rapat Dewan

		Governance (GCG), Size, dan Kinerja Keuangan Terhadap Pengungkapan Sustainability Report pada Perusahaan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Periode 2010-2014)	Governance (Ukuran Komite Audit dan Frekuensi Rapat Dewan Komisaris), Ukuran Perusahaan, Kinerja Keuangan (Profitabilitas, Leverage, dan Likuiditas). Variabel Dependen : Sustainability Report	Komisaris, Ukuran Perusahaan, Leverage dan Likuiditas tidak memiliki adanya pengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan sustainability report; profitabilitas berpengaruh positif yang signifikan terhadap pengungkapan sustainability report
6	Wanda Adila (2016)	Pengaruh Corporate Governance Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan Sustainability Reort	Variabel Independen : Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Profitabilitas, Ukuran; Variabel Dependen : Sustainability Report	Dewan komisaris Independen, komite audit, ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan sustainability report; Profitabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan sustainability report.

2.6 Kerangka Pemikiran

Dari pembahasan latar belakang dan teori diatas, maka kerangka pemikiran saya sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



2.7 Bangunan Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang sudah dinyatakan dengan kalimat tanya. Dikatakan sementara karena dugaan hanya berdasarkan teori yang relevan, yang mana belum didasarkan pada fakta

empiris yang didapatkan dari pengumpulan data (Sugiyono, 2016). Berikut hipotesis-hipotesis variabel dalam penelitian ini adalah:

2.7.1 Komite Audit Terhadap *Sustainability Report*

Berdasarkan keputusan Bapepam Nomor Kep-643/BL/2012 menyatakan bahwa komite audit mengadakan pertemuan setidaknya sama dengan persyaratan minimum yang rapat dewan komisaris yang ditetapkan anggaran dasar perusahaan. Semakin banyak komite audit kualitas, maka mereka akan dapat memahami makna strategis pengungkapan informasi dan apa yang dibutuhkan *stakeholder* secara luas.

Semakin pertemuan komite audit sering, komite koordinasi akan mengaudit lebih baik sehingga dapat melaksanakan pengawasan dari manajemen dengan lebih efektif dan diharapkan dapat mendukung peningkatan publikasi informasi sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini dikarenakan salah satu hal yang mendukung *good corporate governance* adalah dengan mempublikasikan *Sustainability Report*. *Good corporate governance* merupakan suatu proses atau sistem yang bertujuan meningkatkan nilai dan keberlangsungan perusahaan dalam jangka panjang untuk mengambil kepentingan seluruh *stakeholders* (Nasir, dkk, 2014).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Zakiyah, 2016) komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report* karena komite audit merupakan komite yang membantu komisaris atau dewan pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan internal. Sedangkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Aniktia dan Khafid, 2015) komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report* karena adanya komite audit dapat mempengaruhi proses penyusunan dan pengungkapan *sustainability report*. Sehingga hipotesis pada penelitian ini sebagai berikut:

H1 : Komite audit berpengaruh terhadap *sustainability report*.

2.7.2 Dewan Direksi Terhadap *Sustainability Report*

Keefektifan pengawasan dalam aktivitas perusahaan dapat dipengaruhi oleh bagaimana dewan direksi dibentuk dan diselenggarakan. Kinerja yang baik dari dewan akan mampu mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik untuk perusahaan. Dalam penerapannya, pelaksanaan GCG sangat bergantung pada fungsi dewan direksi diyakini telah mengurus perusahaan. Direksi organ yang bertanggung jawab dan perusahaan yang bertanggung jawab sepenuhnya mengelola perusahaan. Semakin tinggi frekuensi pertemuan antara anggota dewan direksi, menunjukkan komunikasi yang lebih sering dan koordinasi antara anggota sehingga jauh lebih mudah untuk mewujudkan *good corporate governance* (Suryono dan Prastiwi, 2011).

Realisasi perencanaan tertulis yang jelas mengenai tanggung jawab perusahaan dapat dipublikasikan melalui *Sustainability Report*. *Sustainability Report* merupakan laporan yang lebih menunjukkan keseriusan perusahaan untuk membuktikan aktivitas sosial dan lingkungan perusahaan dikarenakan terpisah dari annual report. Selain itu dewan direksi merupakan salah satu komponen dalam mewujudkan GCG sehingga dewan direksi perlu mempublikasikan informasi mengenai tanggung jawab sesuai dengan salah satu prinsip GCG yaitu *accountability* (Nasir, dkk, 2014).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Mulyaningsih) dewan direksi tidak berpengaruh terhadap *sustainability report* karena dewan direksi lebih mementingkan kepentingan pemegang saham daripada tujuan perusahaan yang berdampak tidak maksimalnya pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Raharjo, 2016) dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *sustainability report* karena dewan direksi sebagai elemen tertinggi dari pihak manajemen bertanggung jawab atas perolehan legitimasi dari seluruh pemangku kepentingan. Sehingga hipotesis pada penelitian ini sebagai berikut:

H2 : Dewan direksi berpengaruh terhadap *sustainability report*.

2.7.3 Governance Committee Terhadap Sustainability Report

Tanggung jawab untuk aktivitas sosial dan lingkungan oleh perusahaan untuk mencapai keberlanjutan di jangka panjang. Pertumbuhan dan stabilitas perusahaan tergantung pada kesiapan masing-masing perusahaan dalam bentuk rantai nilai dalam tanggung jawab CSR-nya, sehingga organisasi dicari mengolah pengalamannya dalam mendukung pertumbuhan dan stabilitas jangka panjang (Dilling 2009).

Pelaksanaan tanggung jawab perusahaan sebuah stabilitas jangka panjang yang serius dapat dipublikasikan melalui *Sustainability Report*. *Governance committee* dapat merekomendasikan untuk melakukan tanggung sosial melalui *Sustainability Report*. Tanggung jawab sosial merupakan salah satu bukti perusahaan telah memperhatikan stakeholder-nya (Nasir, dkk, 2014).

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Mulyaningsih, 2015) menyatakan bahwa *governance committee* berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report* karena *governance committee* dapat memberikan rekomendasi berupa inisiatif untuk melakukan pengungkapan sosial lingkungan yang lebih dalam mewujudkan salah satu prinsip *good corporate governance* yaitu *transparency*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Pratama dan Yulianto, 2015) *governance committee* tidak berpengaruh terhadap *sustainability report* karena terlalu minimnya perusahaan yang membentuk *governance committee* di Indonesia. Sehingga hipotesis pada penelitian ini sebagai berikut:

H3 : *Governance committee* berpengaruh terhadap *sustainability report*.

2.7.4 Ukuran Perusahaan Terhadap Sustainability Report

Semakin besar perusahaan akan semakin disorot oleh para pemangku kepentingan. Dalam keadaan seperti perusahaan membutuhkan lebih banyak usaha untuk mendapatkan legitimasi pemangku kepentingan untuk menciptakan keselarasan nilai-nilai sosial dari kegiatan dengan norma perilaku dalam masyarakat. Oleh karena itu semakin besar perusahaan akan lebih berkepentingan untuk mengungkapkan informasi lebih banyak (Suryono dan Prastiwi, 2011).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Zakiyah, 2016) ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report* karena besar atau kecilnya ukuran perusahaan, tidak mempengaruhi luas pengungkapan *sustainability report*. Sedangkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Pujiastuti, 2015) ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report* karena semakin besar perusahaan, memiliki kecenderungan untuk mengungkap informasi lebih banyak, sehingga semakin mungkin untuk melakukan pengungkapan *sustainability report*. Sehingga hipotesis pada penelitian ini sebagai berikut:

H4 : Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan *Sustainability Report*.

2.7.5 Leverage Terhadap *Sustainability Report*

Leverage mencerminkan ketergantungan perusahaan pada tingkat para investor dan kreditor dalam membiayai asetnya. Rasio leverage yang tinggi mengakibatkan perusahaan melanggar perjanjian kredit. Hal ini dikarenakan semakin tinggi leverage artinya semakin besar porsi pendanaan perusahaan yang dibiayai oleh utang, sehingga perusahaan cenderung untuk meninggikan laba sekarang. Tujuannya adalah agar perusahaan dapat dengan mudah untuk memperoleh pinjaman, sebab laba yang tinggi menggambarkan kondisi keuangan perusahaan yang kuat dan baik. Pelaporan laba yang tinggi, juga diimbangi dengan pengurangan biaya, termasuk biaya untuk pelaporan sosial dan lingkungan sehingga kinerja keuangannya terlihat bagus. Perusahaan lebih memilih untuk mengurangi pengungkapan laporan terutama yang bersifat sukarela, terlebih terpisah dari *annual report* seperti *sustainability report*, yang tentunya akan memakan dana yang cukup besar. Perusahaan yang tingkat *leverage* tinggi, menganggap perlu memberikan laporan tambahan. Salah satunya yaitu laporan keberlanjutan perusahaan, sehingga ada *good news* tentang perusahaan tersebut agar dapat menarik minat para *stakeholder* untuk menginvestasikan dananya pada perusahaan yang memiliki kondisi keuangan yang sehat dan baik (Arjowo, 2013).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Zakiyah, 2016) leverage tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report* karena tidak adanya pengaruh leverage terhadap publikasi *sustainability report* kemungkinan disebabkan perusahaan yang memiliki leverage tinggi cenderung akan mengurangi biaya-biaya pelaporan sukarela termasuk biaya mempublikasikan *sustainability report*. Sedangkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Pujiastuti, 2015) leverage berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report* karena perusahaan dengan leverage tinggi berupaya untuk mendapatkan legitimasi dari *stakeholder* (termasuk kreditor dan investor) melalui *sustainability report*. Sehingga hipotesis pada penelitian ini sebagai berikut:

H5 : *Leverage* berpengaruh terhadap *sustainability report*.

2.7.6 Likuiditas Terhadap Sustainability Report

Pengungkapan *sustainability report* diharapkan meningkatkan dukungan dari para pemangku kepentingan untuk mendorong investasi masuk. (Soelistyoningrum, 2011) mengatakan bahwa investasi yang diperoleh dari *stakeholder* dapat digunakan untuk membayar perusahaan, sehingga likuiditas perusahaan meningkat.

Selanjutnya untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam jangka pendek yaitu dengan menggunakan rasio likuiditas. Perusahaan yang mendapatkan tingkat likuiditas tinggi dianggap mampu untuk mengelola bisnisnya, sehingga menghasilkan tingkat risiko yang rendah. Yang memiliki tingkat likuiditas yang tinggi merupakan gambaran keberhasilan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek dengan tepat waktu. Ini tentu menunjukkan kemampuan perusahaan kredibel sehingga menciptakan citra positif dan kuat melekat pada perusahaan. Gambar positif para pemangku kepentingan semakin memungkinkan pihak untuk selalu berada di samping perusahaan atau mendukung perusahaan-perusahaan ini (Suryono dan Prastiwi, 2011). Salah satu cara yang dilakukan untuk meningkatkan keyakinan dan *image* yang positif sudah adanyaitu dengan mengungkapkan informasi tambahan yang menggambarkan kegiatan perusahaan yang peduli tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pengungkapan *sustainability report* menjadi salah satu strategi perusahaan untuk semakin

menunjukkan kegiatan perusahaan dalam melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Karena kondisi perusahaan didasarkan pada alasan bahwa bagi perusahaan yang memiliki likuiditas baik, perusahaan tersebut memiliki struktur keuangan yang baik pula. Apabila kondisi ini diketahui oleh publik, maka perusahaan tidak terancam kinerjanya bahkan jika likuiditas perusahaan tersebut tinggi diketahui oleh publik secara langsung atau tidak langsung perusahaan tersebut telah menunjukkan bahwa kinerjanya yang baik.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Zakiyah, 2016) likuiditas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report* karena pemberi pinjaman lebih fokus memperhatikan mengenai kinerja keuangan daripada informasi tambahan mengenai aktivitas sosial dan lingkungan melalui *sustainability report*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Kristianto, 2016) menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *sustainability report* karena perusahaan dapat dengan segera memenuhi kewajibannya menandakan memiliki kinerja keuangan yang baik, dengan begitu perusahaan dapat meningkatkan kepercayaan *stakeholder*, lalu mengungkapkannya pada *sustainability report* sebagai pertanggungjawaban. Sehingga hipotesis pada penelitian ini sebagai berikut:

H6 : Likuiditas berpengaruh terhadap *Sustainability Report*.

2.7.7 Profitabilitas Terhadap *Sustainability Report*

Dengan pengungkapan *sustainability report* yang dilakukan perusahaan diharapkan dapat memberikan bukti nyata bahwa proses produksi yang dilakukan perusahaan tidak hanya berorientasi kepada keuntungan tetapi juga memperhatikan lingkungan sekitar sehingga dapat meningkatkan kepercayaan stakeholder melalui peningkatan investasi yang berdampak kepada peningkatan laba perusahaan. kondisi ini menunjukkan bahwa pengungkapan *sustainability report* dapat meningkatkan kepercayaan publik yang berakibat terhadap meningkatnya profit perusahaan. Dengan demikian, semakin besar tingkat profitabilitas perusahaan maka akan semakin besar pula pengungkapan informasi sosial (Munif, 2010).

Perusahaan memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi cenderung mengungkapkan lebih banyak informasi karena mereka ingin menunjukkan kepada publik atau pihak lain yang perusahaan memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi dibandingkan dengan perusahaan lain dengan industri yang sama. Selain itu, perusahaan juga ingin menunjukkan kepada investor bahwa operasi berjalan efisien. Melalui pengungkapan *sustainability report*, perusahaan dapat menyampaikan informasi mengenai aktivitas-aktivitas yang dilakukan perusahaan yang berpengaruh terhadap kondisi sosial, masyarakat dan lingkungan. Dengan *sustainability report* perusahaan dapat mengkomunikasikan kinerja manajemen dalam mencapai keuntugnan jangka panjang perusahaan kepada *stakeholders*, contohnya yaitu perbaikan kinerja keuangan, maksimalisasi profit dan kesuksesan perusahaan jangka panjang (Wibowo dan Faradiza, 2014).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Zakiyah, 2016) profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report* karena perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi akan mendorong para manajer melakukan publikasi informasi yang lebih untuk meyakinkan investor dan kreditor terhadap profitabilitas perusahaan termasuk publikasi *sustainability report*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Aniktia dan Khafid, 2015) profitailitas tidak berpengaruh terhadap *sustainability report* karena profitabilitas tinggi bisa saja bersumber dari aktivitas perusahaan yang dapat berdampak buruk pada lingkungan dan masyarakat sehingga perusahaan cenderung untuk tidak melakukan pengungkapan sosial dan lingkungan. Sehingga hipotesis pada penelitian ini sebagai berikut:

H7 : Profitabilitas berpengaruh terhadap *Sustainability Report*.